

## Masalah Akuntabilitas Publik Pada Organisasi Pemerintah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tegal)

Narapati Abharina Kibran Niode<sup>1</sup>, Muhammad Yusuf<sup>2\*</sup>

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng

\* Email : [mail2yus@gmail.com](mailto:mail2yus@gmail.com)

HP : 08157608885

### KEYWORDS

*internal control systems,  
organizational  
commitment,  
organizational culture,  
budget participation,  
management accounting  
information systems,  
public accountability*

### ABSTRAK

Fenomena yang terjadi dalam sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas pada organisasi-organisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurut *Indonesia Corruption Watch*, Kota Tegal menempati peringkat pertama se-Jawa Tengah dalam kasus kecurangan akuntansi yang merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan adanya masalah akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, budaya organisasi, partisipasi anggaran dan sistem informasi akuntansi manajemen terhadap akuntabilitas publik. Penelitian dilakukan pada 19 OPD di Kota Tegal. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, budaya organisasi dan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Sedangkan komitmen organisasi dan sistem informasi akuntansi manajemen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Kontribusi penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern, budaya organisasi dan partisipasi anggaran merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik.

### ABSTRACT

*The phenomenon that occurs in the public sector in Indonesia is the strengthening of demands for accountability in government organizations, both central and regional. According to Indonesia Corruption Watch, the City of Tegal is ranked first in Central Java in cases of accounting fraud that have caused losses to state finances. This shows the problem of public accountability in the City Government of Tegal. This study aims to obtain empirical evidence regarding the influence of internal control systems, organizational commitment, organizational culture, budgetary participation and management accounting information systems on public accountability. The study was conducted on 19 OPDs in Tegal City. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the internal control system, organizational culture and budgetary participation had a positive effect on public accountability. Meanwhile, organizational commitment and management accounting information system have no effect on public accountability. The contribution of this study provides empirical evidence that the internal control system, organizational culture and budgetary participation are factors that influence public accountability.*

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada organisasi publik di Indonesia, khususnya di pemerintahan, tuntutan akuntabilitas publik semakin menguat. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kasus kecurangan akuntansi. Di Jawa Tengah, banyak terjadi kasus kecurangan akuntansi pada organisasi pemerintah di kabupaten/kota, seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kasus Kecurangan Akuntansi di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2018

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Kerugian Negara
1	Kota Tegal	2	3	Rp. 23 Miliar
2	Kota Salatiga	3	5	Rp. 12,4 Miliar
3	Kabupaten Karanganyar	2	8	Rp. 11,4 Miliar
4	Kota Semarang	3	6	Rp. 7,3 Miliar
5	Kabupaten Sragen	2	5	Rp. 6,7 Miliar
6	Kabupaten Sukoharjo	2	3	Rp. 4,4 Miliar
7	Kabupaten Pemalang	3	24	Rp. 4,2 Miliar
8	Kabupaten Cilacap	2	2	Rp. 3,7 Miliar
9	Kabupaten Jepara	2	6	Rp. 3,1 Miliar
10	Kabupaten Rembang	3	8	Rp. 2,8 Miliar
11	Kabupaten Kendal	5	7	Rp. 2,5 Miliar
12	Kabupaten Boyolali	3	9	Rp. 1,9 Miliar
13	Kabupaten Blora	1	1	Rp. 1,7 Miliar
14	Kabupaten Magelang	2	3	Rp. 1,7 Miliar
15	Kabupaten Wonosobo	1	1	Rp. 1,5 Miliar
16	Kabupaten Kebumen	2	4	Rp. 1,3 Miliar
17	Kabupaten Semarang	2	2	Rp. 1,1 Miliar
18	Kabupaten Banjarnegara	2	2	Rp. 1 Miliar
19	Kabupaten Kudus	2	2	Rp. 843 Juta
20	Kabupaten Banyumas	4	7	Rp. 815 Juta
21	Kabupaten Wonogiri	4	4	Rp. 806 Juta
22	Kota Magelang	1	1	Rp. 601 Juta
23	Kabupaten Pekalongan	2	2	Rp. 562 Juta
24	Kabupaten Purbalingga	1	6	Rp. 500 Juta
25	Kota Solo	2	2	Rp. 356 Juta
26	Kabupaten Klaten	3	3	Rp. 345 Juta
27	Kota Pekalongan	3	3	Rp. 330 Juta
28	Kabupaten Pati	1	2	Rp. 261 Juta
29	Kabupaten Batang	1	1	Rp. 200 Juta
30	Kabupaten Brebes	1	1	Rp. 150 Juta
31	Kabupaten Demak	1	1	Rp. 90 Juta
32	Kabupaten Grobogan	1	1	Rp. 60 Juta
33	Kabupaten Purworejo	-	-	-
34	Kabupaten Temanggung	-	-	-
35	Kabupaten Tegal	-	-	-

Sumber: Infokorupsi.com, KP2KKN, Direktori Putusan MA

Akuntabilitas publik berfungsi sebagai alat kontrol dan tolok ukur keberhasilan atas kinerja pemerintah. Suatu pekerjaan dianggap berhasil jika mampu diselesaikan dengan baik dan kemudian dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Akuntabilitas publik juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan adanya pertanggungjawaban, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, akuntabilitas publik berfungsi sebagai alat untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan jabatan, khususnya berkaitan dengan keuangan.

Beberapa faktor yang berkaitan dengan akuntabilitas publik, diantaranya adalah sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, budaya organisasi, partisipasi anggaran, dan sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem pengendalian intern merupakan rencana organisasi dan keseluruhan cara atau metode dengan ukuran yang dikoordinasikan yang memiliki tujuan untuk mengamankan harta kekayaan serta keakuratan dan keandalan data akuntansi. Selain itu juga dapat meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Amijaya, 2019). Sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik dan diterapkan secara terukur di organisasi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana setiap individu yang memiliki kepercayaan, keterikatan serta perasaan atas organisasi yang dimiliki sehingga individu tersebut akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dibanding dengan kepentingan pribadinya. Seorang manajer yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan kreatif dan berusaha lebih keras untuk membuat organisasinya berkembang dan lebih mementingkan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadinya (Dewi et al., 2017). Oleh karena itu, komitmen yang tinggi di organisasi pemerintah dapat mendorong meningkatnya akuntabilitas publik.

Budaya organisasi merupakan sekumpulan asumsi penting yang terkait dengan tujuan-tujuan serta praktik-praktik yang dianut oleh semua anggota organisasi tersebut. Menurut Widyaningrum (2012) budaya organisasi adalah seperangkat sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dan berperan dalam organisasi yang dibuat dari kesepakatan untuk mengatasi masalah dalam suatu organisasi. Budaya organisasi berguna sebagai alat untuk menentukan arah organisasi serta mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak dalam mencapai tujuan organisasi. Budaya yang positif di organisasi pemerintah dapat mendorong meningkatnya akuntabilitas publik.

Partisipasi anggaran merupakan proses yang menggambarkan keterlibatan setiap individu dalam penyusunan anggaran dan memiliki pengaruh terhadap target anggaran. Dengan adanya anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja individu akan meningkat. Ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena individu tersebut terlibat dalam penyusunan anggaran (Hamdani & Basri, 2016). Oleh karena itu, partisipasi anggaran dalam organisasi pemerintah dapat mendorong meningkatnya akuntabilitas publik.

Sistem informasi akuntansi manajemen merupakan sistem informasi yang dapat menghasilkan keluaran dengan menggunakan masukan dan berbagai proses yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan tertentu manajemen. Proses tersebut melalui berbagai kegiatan antara lain pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan serta pengelolaan informasi (Agustin, 2019). Pimpinan di lembaga pemerintah dapat menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang baik dan berdampak meningkatnya akuntabilitas publik.

Dari tabel 1 di atas, 32 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tersangkut kasus kecurangan akuntansi yang merugikan keuangan negara. Dalam *Indonesia Corruption Watch*, Kota Tegal tercatat menempati peringkat pertama dengan total kerugian negara senilai 23 Miliar. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam akuntabilitas publik di Jawa Tengah, terutama pada Pemerintah Kota Tegal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, budaya organisasi, partisipasi anggaran dan

sistem informasi akuntansi manajemen terhadap akuntabilitas publik, dengan mengambil objek penelitian pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Tegal. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur akuntansi berkaitan dengan masalah akuntabilitas publik pada organisasi pemerintahan di Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Organisasi**

Secara sederhana, organisasi adalah sekelompok manusia yang bekerja bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama (Sobirin, 2007). Dengan kata lain, esensi dari organisasi adalah sekelompok manusia dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Karakteristik organisasi secara lebih kompleks terdiri dari lima karakteristik utama, yaitu: entitas sosial, beranggotakan minimal dua orang, berpola kerja yang terstruktur, mempunyai tujuan, dan mempunyai identitas diri. Dalam teori organisasi, dimensi organisasi terdiri dari dimensi struktural dan dimensi kontekstual.

Dimensi struktural adalah karakter yang bersumber pada sisi internal organisasi. Contoh dimensi struktural adalah hirarki otoritas, standarisasi pekerjaan, kompleksitas organisasi, dan lain-lain. Sementara dimensi kontekstual adalah karakteristik organisasi secara menyeluruh yang ditentukan oleh besar kecilnya organisasi, lingkungan organisasi, budaya organisasi, dan lain-lain. Dimensi kontekstual inilah yang menjadi faktor penentu keberadaan organisasi secara menyeluruh dan berpengaruh terhadap dimensi struktural. Organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki hierarki kewenangan, tugas dan fungsi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik secara struktural maupun fungsional yang tujuannya adalah mengimplementasikan tujuan dari negara untuk rakyatnya.

### **Teori Keagenan**

Dalam teori keagenan, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu tujuan atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen and Meckling, 1976). Hubungan keagenan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan, berfokus pada persoalan konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* dan ketimpangan/asimetri informasi antara pemerintah (agen) dan publik (prinsipal) yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Publik/Dewan Perwakilan Rakyat harus memonitor kerja pemerintah, agar tujuan pemerintahan dapat dicapai dengan efektif dan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik**

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Juwita, 2016). Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dalam organisasi pemerintah akan menciptakan keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintah yang baik pula, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa kegiatan, program atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah telah berjalan sesuai

tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan mendorong meningkatnya akuntabilitas publik di organisasi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2016) dan Sari (2017) menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Demikian juga pada hasil penelitian Arlianti *et al.* (2018), Huwaida (2018), dan Agustin (2019) menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Sistem pengendalian intern yang baik memaksimalkan kontrol dan monitoring. Kondisi ini dapat mencegah tindakan *moral hazard*, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik. Semakin kuat pengendalian intern dalam suatu organisasi maka akuntabilitas publik akan semakin baik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.**

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Publik**

Konsep tentang komitmen organisasi berkembang pada studi awal mengenai loyalitas individu yang diharapkan ada pada diri pegawai. Kondisi keterikatan kerja yang sangat erat yang dirasakan para pegawai, menimbulkan perilaku positif yang kuat terhadap organisasi. Dalam organisasi, komitmen bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang sama merupakan bentuk loyalitas yang lebih kongkrit, yang dapat dilihat dari upaya pegawai mencurahkan perhatian, gagasan dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi. Suatu bentuk ikatan kerja yang kuat bukan bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasinya. Komitmen yang tinggi aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi dapat mengurangi konflik kepentingan, sehingga akuntabilitas publik akan semakin baik.

Zeyn (2010) mengemukakan komitmen organisasi dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pada tingkat yang cukup (sedang). Kondisi ini memperlihatkan semakin baik komitmen organisasi maka semakin baik pula akuntabilitas publiknya. Indriyani *et al* (2017) dan Arjuna & Putri (2019) pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Hal ini berarti bahwa komitmen yang tinggi dari suatu organisasi dapat mendorong meningkatnya akuntabilitas publik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub> : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.**

### **Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Publik**

Individu dalam suatu organisasi tidak terlepas dari norma yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Suatu norma dalam organisasi akan menjadi budaya dalam organisasi, dimana dapat mempengaruhi cara individu bertingkah laku, bekerja, dan berinteraksi dengan individu lain. Budaya organisasi diharapkan baik, karena budaya organisasi berhubungan dengan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan (Rangkuti, 2018). Keberadaan budaya dalam organisasi pemerintahan akan menjadi perekat dan pedoman dari seluruh kebijakan pemerintah serta aspek-aspek lain dalam organisasi. Jika nilai-nilai budaya positif telah menjadi pedoman dalam pembuatan aturan organisasi, maka akan berkontribusi terciptanya akuntabilitas publik.

Atan *et al* (2017) dalam penelitiannya membuktikan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Mereka menyatakan bahwa budaya organisasi yang etis dan terintegrasi dinilai mampu untuk menguatkan etika organisasi, transparansi, dan profesionalisme. Sedangkan kegagalan untuk menanamkan budaya organisasi yang etis akan menimbulkan kesalahan manajemen, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan. Demikian juga Rangkuti (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Budaya organisasi yang positif dapat meminimalkan konflik kepentingan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub> : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.**

### **Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Publik**

Partisipasi anggaran berfokus pada upaya untuk meningkatkan motivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan melibatkan atasan dan bawahan dalam proses penyusunan anggaran. Keterlibatan atasan dan bawahan dalam proses penyusunan anggaran di organisasi pemerintahan dapat mendorong akuntabilitas publik. Menurut wicaksono (2016), hal ini disebabkan ada tiga hal yaitu pertama, adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran akan menyebabkan atasan dan bawahan akan berkomitmen dalam organisasi karena adanya tanggung jawab yang timbul dimana anggaran merupakan hasil diskusi kedua belah pihak. Kedua, dalam partisipasi penyusunan anggaran terjadi persamaan karena atasan melibatkan bawahan sebagai penyusun anggaran. Ketiga, partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran membuat atasan akan mengetahui informasi dari bawahan terkait pada pekerjaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Coryanata et al (2017) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Demikian juga Penelitian Agustin (2019) membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dapat mengurangi konflik kepentingan serta memotivasi anggota organisasi berkomitmen dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga berdampak pada meningkatnya akuntabilitas publik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub> : Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.**

### **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Akuntabilitas Publik**

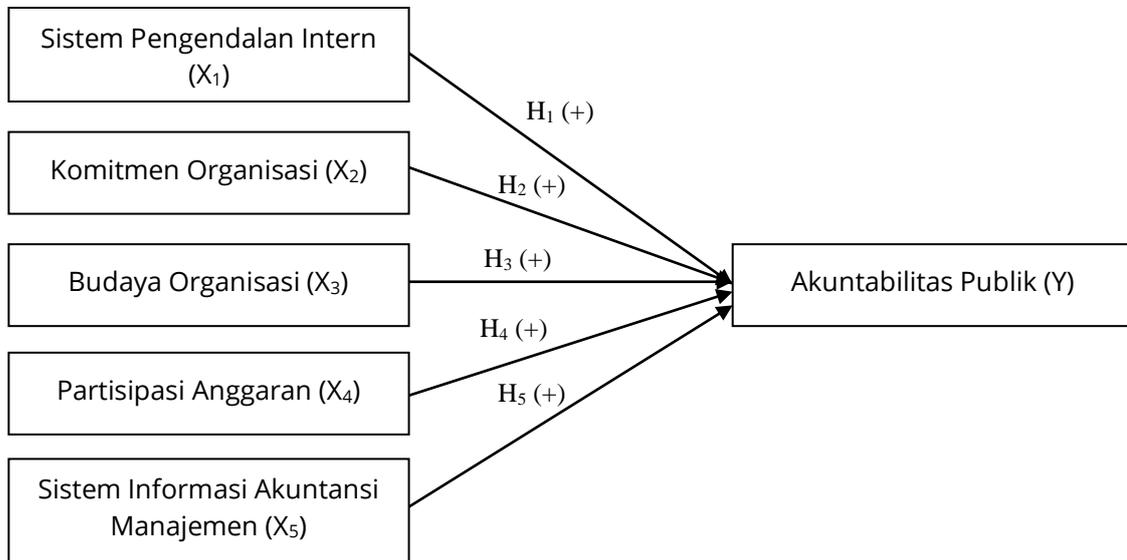
Menurut PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, informasi keuangan yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip: (1) Akurat, adalah suatu tindakan yang mencerminkan ketelitian, kecermatan, dan ketepatan; (2) Relevan, adalah suatu keadaan yang sesuai dengan kondisi obyektif sekarang dan masa datang; (3) Dapat dipertanggungjawabkan, adalah suatu kondisi atau fakta yang dapat diperbandingkan secara angka nominal dan matematis. Sistem informasi akuntansi manajemen yang dirancang dengan baik dapat mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi antara pemerintah dan publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Hasil penelitian Saptoru & Gunawan (2018) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Hasil penelitian Masiaga (2019) juga menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi yang andal dapat membantu aparatur pemerintah dalam pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>5</sub> : Sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.**

## Model Penelitian

Gambar 1. Model Penelitian



## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah 19 OPD di Kota Tegal. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana dalam pengambilan sampel terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi dalam penyajian laporan keuangan serta pertanggungjawaban atas laporan yang disajikan. Pejabat tersebut yaitu pegawai bagian keuangan dan akuntansi, dengan 5 responden masing-masing instansi. Dengan demikian sampel yang digunakan adalah 95 responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah KotaTegal, jumlah Dinas di Kota Tegal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah PNS Bagian Keuangan dan Akuntansi Dinas Kota Tegal

No.	Dinas di Kota Tegal
1	Dinas Kesehatan
2	Dinas Pendidikan
3	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Inspektorat
5	Dinas Pemukiman
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7	Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan
8	DPPKBP2PA
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM

11	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
12	Dinas Perhubungan
13	RSUD Kardinah
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Sosial
17	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Badan Keuangan Daerah
19	DPMPTSP

Sumber: Pemerintah Kota Tegal (2020)

### Definisi Operasional dan Indikator

Tabel 3. Definisi Operasional dan Indikator

No.	Variabel penelitian	Indikator
1.	Sistem Pengendalian Intern	X <sub>1,1</sub> : Lingkungan pengendalian X <sub>1,2</sub> : Penilaian risiko X <sub>1,3</sub> : Kegiatan pengendalian X <sub>1,4</sub> : Informasi dan komunikasi X <sub>1,5</sub> : Pemantauan pengendalian intern
2.	Komitmen Organisasi	X <sub>2,1</sub> : Keyakinan terhadap tujuan organisasi X <sub>2,2</sub> : Perasaan memiliki organisasi X <sub>2,3</sub> : Mempertahankan keanggotaan organisasi X <sub>2,4</sub> : Kesetiaan dalam organisasi X <sub>2,5</sub> : Kesiediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi
3.	Budaya Organisasi	X <sub>3,1</sub> : Inovasi dan pengambilan risiko X <sub>3,2</sub> : Perhatian ke hal yang rinci atau detail X <sub>3,3</sub> : Orientasi hasil X <sub>3,4</sub> : Orientasi orang X <sub>3,5</sub> : Orientasi tim X <sub>3,6</sub> : Keagresifan X <sub>3,7</sub> : Kemantapan/stabilitas
4.	Partisipasi Anggaran	X <sub>4,1</sub> : Keterlibatan dalam penyusunan anggaran X <sub>4,2</sub> : Pengaruh terhadap penetapan anggaran X <sub>4,3</sub> : Pentingnya usulan anggaran X <sub>4,4</sub> : Kelogisan dalam anggaran
5.	Sistem Informasi Akuntansi Manajemen	X <sub>5,1</sub> : Karakteristik informasi akurat X <sub>5,2</sub> : Karakteristik informasi relevan X <sub>5,3</sub> : Karakteristik informasi dapat dipertanggungjawabkan
6.	Akuntabilitas Publik	Y <sub>1,1</sub> : Kejujuran dan keterbukaan informasi Y <sub>1,2</sub> : Kepatuhan dalam pelaporan Y <sub>1,3</sub> : Kecukupan informasi Y <sub>1,4</sub> : Kesesuaian prosedur

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden sehingga diperoleh data yang bersifat primer. Pengukuran variabel dengan skala *likert* menggunakan penilaian yang dimodifikasi menjadi lima jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

## Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji kebaikan model, dan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Instansi Pemerintah pada Kota Tegal berjumlah 19 OPD. Dari 19 OPD di Kota Tegal terdapat 8 yang tidak dapat diolah dari 95 kuesioner yang disebar pada instansi pemerintah Kota Tegal, kuesioner yang dapat diolah berjumlah 87 kuesioner. Berikut gambaran umum mengenai penyebaran kuesioner.

Tabel 4. Gambaran Umum Penyebaran Kuesioner

No.		Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner disebar	95	100%
2.	Kuesioner tidak diisi (ditolak)	8	8,4%
3.	Kuesioner kembali	87	91,6%
4.	Kuesioner diolah	87	100%

Sumber: data primer diolah, 2020

### Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dari variabel penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
Sistem pengendalian intern ( $X_1$ )	87	10	27	21,68	3,300
Komitmen organisasi ( $X_2$ )	87	18	35	27,00	3,318
Budaya organisasi ( $X_3$ )	87	4	20	13,57	2,422
Partisipasi anggaran ( $X_4$ )	87	18	34	25,14	3,499
Sistem informasi akuntansi manajemen ( $X_5$ )	87	10	19	13,72	2,110
Akuntabilitas publik	87	16	34	27,01	3,748

Sumber: data primer diolah, 2020

Hasil analisis deskriptif dari variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$  dan Y adalah:

1. Variabel sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden bernilai 4,337 yaitu setuju, dengan standar deviasi 0,66.
2. Variabel komitmen organisasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden bernilai 4,5 yaitu setuju, dengan standar deviasi 0,553.
3. Variabel budaya organisasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden bernilai 3,393 yaitu netral, dengan standar deviasi 0,606.
4. Variabel partisipasi anggaran menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden bernilai 4,19 yaitu setuju, dengan standar deviasi 0,583.
5. Variabel sistem informasi akuntansi manajemen menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden bernilai 3,429 yaitu netral, dengan standar deviasi 0,527.
6. Variabel akuntabilitas publik menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden bernilai 4,501 yaitu setuju, dengan standar deviasi 0,625.

## Hasil Uji Keandalan Instrumen Penelitian

### Uji Validitas

Korelasi antara masing-masing indikator terhadap skor total pada variabel bebas (sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, budaya organisasi, partisipasi anggaran dan sistem informasi akuntansi manajemen) dan variabel terikat (akuntabilitas publik), menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu R hitung > R tabel (0,2108), sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator dinyatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Standar CA	Koefisien CA	Keterangan
Sistem pengendalian intern (X <sub>1</sub> )	0,60	0,842	Reliable
Komitmen organisasi (X <sub>2</sub> )	0,60	0,648	Reliable
Budaya organisasi (X <sub>3</sub> )	0,60	0,624	Reliable
Partisipasi anggaran (X <sub>4</sub> )	0,60	0,690	Reliable
Sistem informasi akuntansi manajemen (X <sub>5</sub> )	0,60	0,707	Reliable
Akuntabilitas publik (Y <sub>1</sub> )	0,60	0,777	Reliable

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa keenam variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dapat dikatakan seluruh variabel dapat dipercaya (*reliable*).

### Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan	Unstandardized coefficients		
	B	Std. Error	Sig.
Sistem pengendalian intern (X <sub>1</sub> )	0,320	0,087	0,000
Komitmen organisasi (X <sub>2</sub> )	0,020	0,082	0,807
Budaya organisasi (X <sub>3</sub> )	0,200	0,087	0,024
Partisipasi anggaran (X <sub>4</sub> )	0,499	0,078	0,000
Sistem informasi akuntansi manajemen (X <sub>5</sub> )	0,018	0,052	0,728

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel di atas dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$\text{Akuntabilitas publik} = 3,431 + 0,320 \text{ SPI} + 0,020 \text{ KO} + 0,200 \text{ BO} + 0,499 \text{ PA} + 0,018 \text{ SIAM} + e$$

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,590
Asymp. Sig (2-tailed)	0,878

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai *asympt. sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,878 yang berarti pengujian  $> 0,05$  sehingga nilai residual terdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	Variance Inflation Factor
Sistem pengendalian intern ( $X_1$ )	0,619	1,615
Komitmen organisasi ( $X_2$ )	0,612	1,635
Budaya organisasi ( $X_3$ )	0,734	1,362
Partisipasi anggaran ( $X_4$ )	0,575	1,740
Sistem informasi akuntansi manajemen ( $X_5$ )	0,959	1,042

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, budaya organisasi, partisipasi anggaran, sistem informasi akuntansi manajemen memiliki nilai *tolerance*  $> 0,10$  yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF  $< 10$  sehingga tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,292	0,085	0,029	2,85525

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai *R square* sebesar 0,085. Nilai *chi square* hitung dapat diperoleh melalui perkalian antara nilai *R square* dengan jumlah sampel ( $C^2 = R^2 \times n$ ). Maka diperoleh nilai *chi square* sebesar 7,395 ( $0,085 \times 87$ ). *Chi square* tabel pada  $\alpha$  5% dengan df (k-1) dimana k merupakan jumlah variabel independen yang dalam penelitian ini berjumlah 5 variabel. Artinya, nilai *chi square* tabel dapat dilihat pada df (5-1), maka diperoleh *chi square* tabel pada urutan ke-4 sebesar 9,488. Nilai *chi square* hitung lebih kecil dari *chi square* tabel ( $7,395 < 9,488$ ) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Uji Kebaikan Model (Uji F)

Tabel 11. Hasil Uji Kebaikan Model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	374,323	5	74,865	33,941	0,000
Residual	178,666	81	2,206		
Total	552,989	86			

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  serta nilai F hitung  $33,941 > F$  tabel 2,326 yang berarti semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Sehingga data sampel suatu penelitian telah *fit* dengan model regresi yang diajukan.

### Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Squared*)

Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persentase pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,292	0,085	0,029	2,85525

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* koefisien determinasi sebesar 0,657 atau 65,7%, yang berarti persentase kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 65,7% sedangkan sisanya sebesar 34,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	B	Sig	Keterangan
1.	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik	0,320	0,000	Diterima
2.	Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik	0,020	0,807	Ditolak
3.	Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik	0,200	0,024	Diterima
4.	Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik	0,449	0,000	Diterima
5.	Sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik	0,018	0,728	Ditolak

### Pembahasan Hipotesis

#### Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik

Dari hasil uji t, variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai koefisien regresi positif 0,320 dan nilai signifikansi 0,000 di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan arah pengaruh positif dan signifikan, artinya sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik, sehingga **hipotesis 1 diterima**. Dari hasil analisis deskriptif rata-rata jawaban responden bernilai 4,337 yaitu setuju, hal ini menguatkan hasil pengujian hipotesis. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan organisasi pemerintah dilaksanakan. Sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik dan diterapkan secara terukur akan memaksimalkan kontrol dan monitoring yang dapat mencegah atau meminimalisir tindakan *moral hazard*. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern yang baik akan menciptakan keseluruhan proses kegiatan berjalan dengan baik pula, sehingga akan memberikan suatu keyakinan bagi organisasi pemerintah bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas publik pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2014), Juwita (2016), Sari (2017), Arlianti *et al.* (2018), Huwaida (2018), dan Agustin (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Publik**

Dari hasil uji t, variabel komitmen organisasi memiliki nilai koefisien regresi positif 0,020 dan nilai signifikansi 0,807 di atas 0,05. Hal ini menunjukkan arah pengaruh positif namun tidak signifikan, artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, sehingga **hipotesis 2 ditolak**. Dari hasil analisis deskriptif rata-rata jawaban responden bernilai 4,5 yaitu setuju, namun pola data secara statistik tidak tepat jika diuji dengan pendekatan linier karena hasilnya dapat bias atau tidak signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan jawaban responden tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Menurut Indonesia Corruption Watch, Kota Tegal tercatat menempati peringkat pertama di Jawa Tengah dalam kasus kecurangan akuntansi yang merugikan keuangan negara, dimana kondisi ini dapat merefleksikan adanya masalah komitmen berkaitan dengan akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitiannya Zeyn (2010), Indriyani *et al* (2017) dan Arjuna & Putri (2019), namun sejalan dengan penelitian Hendratmi *et al* (2017) yang menyatakan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

### **Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Publik**

Dari hasil uji t, variabel budaya organisasi memiliki nilai koefisien regresi positif 0,200 dan nilai signifikansi 0,024 di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan arah pengaruh positif dan signifikan, artinya budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik, sehingga **hipotesis 3 diterima**. Meskipun hasilnya signifikan, namun dari hasil analisis deskriptif rata-rata jawaban responden bernilai 3,393 yaitu netral, yang menunjukkan moderat atau ragu-ragu. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan Kota Tegal yang menempati peringkat pertama di Jawa Tengah dalam kasus kecurangan akuntansi yang merugikan keuangan negara, dimana netralitas ini dapat merefleksikan adanya sisi lain budaya yang mungkin kurang kondusif atau etis berkaitan dengan akuntabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Nurviasari & Riharjo (2016), Atan *et al* (2017) dan Rangkuti (2018) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

### **Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Publik**

Dari hasil uji t, variabel partisipasi anggaran memiliki nilai koefisien regresi positif 0,449 dan nilai signifikansi 0,000 di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan arah pengaruh positif dan signifikan, artinya partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik, sehingga **hipotesis 4 diterima**. Dari hasil analisis deskriptif rata-rata jawaban responden bernilai 4,19 yaitu setuju, hal ini menguatkan hasil pengujian hipotesis. Keterlibatan anggota organisasi (atasan dan bawahan) dalam proses penyusunan anggaran dapat memotivasi anggota organisasi berkomitmen dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran dan organisasi, sehingga mendorong meningkatnya akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Coryanata *et al* (2017) dan Rere (2018) yang menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Demikian juga penelitian Agustin (2019) membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

### **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Akuntabilitas Publik**

Dari hasil uji t, variabel sistem informasi akuntansi manajemen memiliki nilai koefisien regresi positif 0,018 dan nilai signifikansi 0,728 di atas 0,05. Hal ini menunjukkan arah pengaruh positif namun tidak signifikan, artinya sistem informasi akuntansi manajemen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, sehingga **hipotesis 5 ditolak**. Dari hasil analisis deskriptif rata-rata jawaban responden bernilai 3,429 yaitu netral, yang menunjukkan moderat atau ragu-ragu. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan Kota Tegal yang menempati peringkat pertama di Jawa Tengah dalam kasus kecurangan akuntansi yang merugikan keuangan negara, dimana netralitas ini dapat merefleksikan adanya masalah dalam pelaporan keuangan. Menurut PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah, informasi keuangan yang dilaporkan harus memenuhi prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitiannya Saptoru & Gunawan (2018) dan Masiaga (2019), namun sejalan dengan penelitian Listiana (2017) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, budaya organisasi dan partisipasi anggaran merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik. Sedangkan komitmen organisasi dan sistem informasi akuntansi manajemen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Namun demikian, faktor komitmen dan budaya harus menjadi perhatian khusus. Masalah komitmen dari aparatur pemerintah dan budaya yang tidak kondusif atau etis seperti kolusi, korupsi dan nepotisme dapat menyebabkan sistem pengendalian intern dan partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya. Hal ini dapat mengikis atau bahkan menghilangkan peran positif dari sistem pengendalian intern dan partisipasi dalam penyusunan anggaran berkaitan dengan akuntabilitas publik. Kondisi ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Kota Tegal tercatat peringkat pertama di Jawa Tengah dalam kasus kecurangan akuntansi yang merugikan keuangan negara.

### Saran

Penelitian ini menggunakan kuesioner, dimana jawaban yang diberikan oleh responden kemungkinan tidak merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, disarankan melakukan pendampingan dalam pengisian kuesioner. Hal ini untuk memastikan responden memahami dengan baik dan memiliki persepsi yang benar tujuan dari penelitian dan maksud dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Dengan demikian, diharapkan jawaban dari responden dapat merefleksikan kondisi yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 109. <https://doi.org/10.30630/jakmenpnp.14.2.179>
- Agustin, P. N. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi dan Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada PT. PLN (Persero) Area Majalaya Rayon Rancaekek). *JASA (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Amijaya, H. T. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Good Corporate Governance sebagai variabel intervening( Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat ). *Jurnal Computech & Bisnis*, 13(2), 70-80.
- Arjuna, & Putri, A. M. (2019). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(2), 1-13.
- Arlianti, Z. M., Wafirotin, K. Z., & Marsiwi, D. (2018). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelola Amil Zakat (Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Madiun Dan Ponorogo). *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.24269/iso.v2i1.128>
- Atan, R., Alam, M. M., & Said, J. (2017). Practices of Corporate Integrity and Accountability of Non-Profit Organizations in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 7(1), 45-56.
- Dewi, N. K. S. S., Putra, I. G. C., & Merawati, L. K. (2017). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(2), 211-221.

- Fajri, Rosa Nikmatul SE, M. Acc, A., Djumali, Drs, M., & Hartono, Sri, SE, M. S. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang) Rosa. *Jurnal Ekonomi Vokasi*, 2(1), 1–15.
- Fitrawati, Kahar, A., & A, M. I. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. *Jurnal Katalogis*, 5(12), 177–184.
- Hamdani, E. H., & Basri, H. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi Kerja dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Manajerial. *Journal of Accounting Research and Review*, 9(1), 19–26.
- Hendratmi, H., Mulyadi, J., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh Transparansi dan Komitmen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(2), 76–93.
- Huwaida, A. (2018). Analisis Akuntabilitas Publik Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan Kepemimpinan (Studi pada BAZNAS dan LAZ Se-Eks Karesidenan Surakarta). *Skripsi*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indriyani, L. F., Diatmika, P. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar). *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.10463>
- Jensen and Meckling. (1976). The Resource-Based View Within the Conversation of Strategic Management Author ( s ): Joseph T . Mahoney and J . Rajendran Pandian Published by : Wiley Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/2486455> The Resource-Based View Within The Conversation Of STR. *Strategic Management Journal*, 13(4), 223–242. <https://doi.org/10.1002/mde.l218>
- Juwita, R. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 615–622. <https://doi.org/10.22219/jrak.v4i2.4946>
- Listiana, I. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Publik. *Skripsi*.
- Nurviasari, R., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh sistem informasi, komitmen manajemen, budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(April), 1–19.
- Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga*.
- Pemerintah. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil*.
- Rahmat, I. S. B. (2014). Pengaruh Pengendalian Intern dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Bandung. *Skripsi*, 37–39.
- Rangkuti, M. H. B. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Di Instansi Pemerintah*. 8(2), 1–14.
- Rere, Y. D. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3(3), 560–568.
- Riduwan, D. M. . (2018). *Dasar-dasar Statistika* (Edisi 15). Alfabeta CV.
- Sapto, J., & Gunawan, G. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi, Teknologi Informasi, dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, 2(4).